

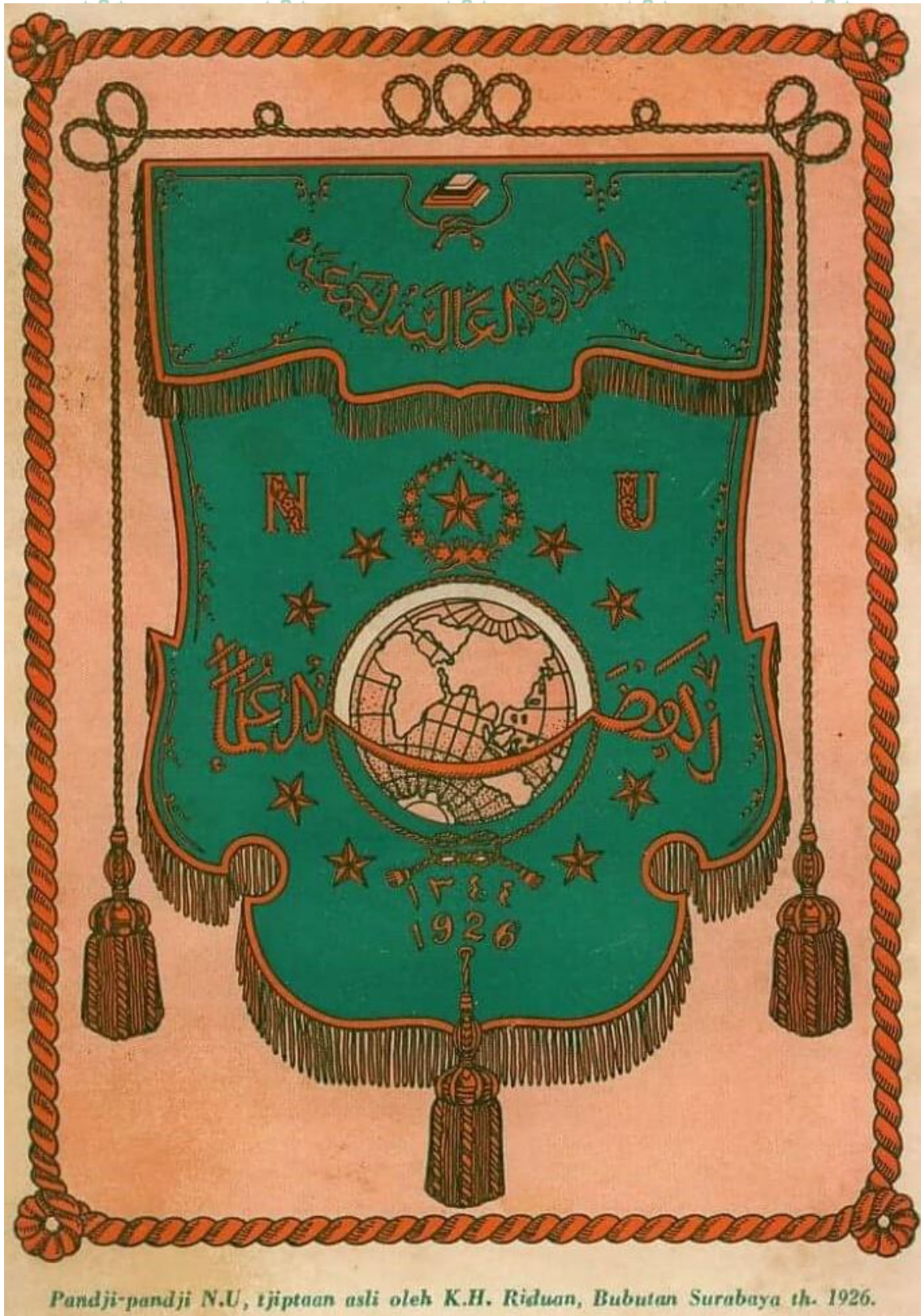


**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL
ALIM ULAMA
NAHDLATUL ULAMA**

**LOMBOK TENGAH –
NUSA TENGGARA BARAT
16–20 Rojab 1418 H
17–20 Nopember 1997 M**

SUMBER

**Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011.
*Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum
Islam (Keputusan Mukhtamar, Musyawarah Nasional,
dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926–2010 M).*
Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama
dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.**



Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

**HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH
NASIONAL ALIM ULAMA
NAHDLATUL ULAMA TENTANG
MASAIL DINIYAH WAQI'IYYAH
16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M
Di Ponpes QOMARUL HUDA
Bagu, Pringgarata Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat**

- 407. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Dua Angkatan
- 408. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Tanpa *Mustauthinin* dan *Muqimin*
- 409. Pemindahan Komplek Makam
- 410. Nikah Mut'ah
- 411. *Bai'ud Dain* (Jual Beli Piutang)
- 412. *Bai'ul 'Inah* (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari Berhutang Kepada Pemberi Hutang)
- 413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang Berhutang Belum Melunasi
- 414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis Orang Lain
- 415. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS
- 416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis
- 417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia
- 418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa
- 419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang Tidak Memadai

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 1418 H/1997 M**

Nomor: 001/Munas/1997

Tentang

**ITTIFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH DINIYAH
WAQI'IYYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M**

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997;
- b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997.
- c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997;
- d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi A Masail Diniyah Waqi'iyyah.

Mengingat:

- a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d. 7;
- b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.e/VII 1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997;

MEMUTUSKAN

Mengingat:

1. Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Ittifaq Hukum Mengenai Beberapa Masalah Diniyah Waqi'iyyah, seperti terlampir;
2. Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1418 H
20 Nopember 1997 M

**MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M**

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH MA'RUF AMIN

DR. H. AQIL SIRADJ, MA

MUNAS NAHDLATUL ULAMA
16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M
Di Ponpes QOMARUL HUDA
Bagu, Pringgarata Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat

Pimpinan Sidang
Masail Diniyah Waqi'iyah
KH.A. Aziz Masyhuri Ketua
KH. Ghazali Masruri Sekretaris

Pendamping
1. KH. M. Rodli Sholeh
2.. KH. Dr. Nahrowi Abd. Salam
1. KH. Yusuf Amin
1. KH. Drs. Dawam Anas
5. KH. Imron Hamzah

Anggota Tim Perumus
1. KH. Drs. Masduqi Mahfudz
2. KH. Drs. Safruddin Syarif
3. KH. Nadhif Zuhri
4. KH. A. Wahid Zuhdi
5. KH. Drs. Ahmad Ansori
6. KH. Subadar
7. KH. Drs. Siddiqi Muhdar
8. KH. Drs. Hasyim Abbas
9. KH. Abdullah Mukhtar
10. KH. Anang Manshur
11. KH. Cholil Anwar
12. KH. Drs. Sanusi Nasution
13. KH. A. Waris Ilyas

407. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Dua Angkatan

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya dewasa ini dirasakan semakin meningkat. Hal ini antara lain ditandai dengan syiar agama yang kian semarak, dan membludaknya mesjid-mesjid dalam shalat Jum'at. Penyelenggaraan shalat Jum'at tidak hanya di pemukiman, tapi juga di perkantoran, pertokoan dan kawasan industri.

Namun hal ini belum sepenuhnya diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana ibadah yang cukup memadai, serta masih terdapatnya faktor-faktor kondisional yang menyebabkan tidak terpenuhinya hasrat untuk menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Para karyawan pabrik kaca, misalnya, tidak dapat secara bersama-sama melaksanakan shalat Jum'at karena ada proses yang tidak dapat ditinggal sama sekali. Ada pula pertokoan yang tetap buka saat shalat Jum'at, sehingga tidak memungkinkan pramuniaga prianya secara serentak meninggalkan tugasnya. Hal ini bisa diatasi dengan menyelenggarakan shalat Jum'at secara bergantian, bertahap, atau shalat Jum'at dalam dua shif (angkatan).

S: Bolehkah menyelenggarakan shalat Jum'at kedua dan seterusnya oleh orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak mungkin ditinggalkan sama sekali pada hari Jum'at itu karena menjaga produksi dari kerusakan.

J: Ta'addud Jum'at berbeda dengan Jum'atan dua shif/angkatan atau lebih (insya al- jum'ah ba'da al-jum'ah).

Ta'addud Jum'at ialah berbilangnya penyelenggaraan jamaah Jum'at dalam satu masa di suatu tempat, dan hukumnya boleh dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana keputusan Mukhtamar NU di Situbondo, Nopember 1984, dalam masalah nomor 359.

Adapun Jum'atan dua shif/angkatan atau lebih (*insya al- jum'ah ba'da al-jum'ah*) yang artinya penyelenggara shalat Jum'at lebih dari satu di suatu tempat, maka hukumnya tidak sah.

Jalan Keluar

- Karyawan seperti itu wajib berikhtiar seoptimal mungkin agar dapat menunaikan jum'atan shiff pertama.
- Sebaiknya ditugaskan kepada karyawan untuk menjaga produksi agar karyawan dapat menunaikan shalat Jum'at.
- Dalam hal ikhtiar tersebut bila tidak berhasil maka kewajiban shalat Jum'at menjadi gugur dan wajib menunaikan shalat Zhuhur dan dianjurkan berjamaah. Jika ada *udzur syar'i* di dalam meninggalkan

shalat Jum'at demikian ini dengan mengganti shalat Zhuhur hukumnya tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada udzur syar'i, hukumnya berdosa.

Rekomendasi:

Kepada Pemerintah dan para produsen/pengusaha agar memberikan jaminan kebebasan kepada para karyawan untuk menjalankan agamanya, dan melaksanakan shalat Jum'at.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Minhaj al-Qawim*¹

أَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إِنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ مُمْتَنِعٌ

Adapun selain makmum, maka tidak boleh mengganti imam shalat jum'at (ketika si imam *hadats* di tengah-tengah shalat), karena serupa dengan membentuk salat Jum'at setelah salat Jum'at yang lain (dalam satu masa secara serentak di tempat yang sama). Dan hal tersebut tidak tidak diperbolehkan.

2. *Tanwir al-Qulub*²

... حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَمْ يَقْمَحْهَا إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ ﷺ وَلَمْ يُرَخَّصْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ فَرَطِ حُبِّهِ لِلتَّيْسِيرِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي أَنْ يَقِيمُوهَا فِي مَسَاجِدَ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ يُصَلِّيَ بِمَنْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْحُضُورُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَيَأْذَنُ فِي أَنْ تُقَامَ بَعْدَهُ جُمُعَةٌ وَجُمُعَةٌ وَثَالِثَةٌ وَهَكَذَا لِبَاقِي الدِّينِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْضُرُوا، وَكَانَ ذَلِكَ أَيْسَرَ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ

... sehingga jika sudah datang hari Jum'at, maka beliau Saw. tidak melaksanakan salat Jum'at kecuali di mesjidnya Saw. dan beliau Saw. meskipun sangat ingin memberikan kemudahan kepada umatnya tidak memberi dispensasi untuk mendirikan shalat Jum'at di banyak mesjid, atau shalat bersama orang yang bisa datang kepadanya di awal waktu, dan mendirikan shalat jumat kedua, ketiga dan seterusnya bagi mereka yang tidak bisa datang (di awal waktu). Padahal cara itu lebih mudah bagi mereka seandainya memang diperkenankan.

3. *Hasyiyah al-Syarwani*³

¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qawim* pada *al-Hawasyi al-Madaniyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1340 H), Juz II, h. 50.

² Muhammad Ain al-Irbili, *Tanwir al-Qulub*, (Surabaya: Syirkah Bugkul Indah, t. th.), h. 189.

³ Abdul Hamid al-Syirwani, *Hawasyi al-Syirwani* pada *Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 406.

وَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ إِحْضَارِ الْخُبْزِ لِمَنْ يُخْبِزُهُ وَيُعْطِي مَا جَرَتْ لَهُ الْعَادَةُ مِنَ الْأَجْرَةِ فَلَيْسَ اشْتِغَالُهُ بِالْخُبْزِ عُذْرًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى تَلْفِهِ مَا لَمْ يُكْثِرْهُ صَاحِبُ الْخُبْزِ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ فَلَا يَعْصِ

Adapun kebiasaan yang berlaku, yaitu menghidangkan roti bagi bagi orang yang menyuruhnya membuat roti dan memberikan upah seperti biasanya, maka kesibukannya dengan roti itu tidak menjadi *udzur* (meninggalkan shalat jum'at), namun ia wajib mengikuti shalat Jum'at walaupun dapat menyebabkan kerusakan roti itu selama pemilik roti tidak memaksanya untuk tidak mengikuti. Maka dalam hal ini ia tidak berdosa.

4. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*⁴

الشَّافِعِيُّ قَالُوا مَنْ قَاتَهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ أَوْ لِعَيْرِهِ سُنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ

Para ulama Syafi'i berpendapat, barangsiapa yang ketinggalan shalat Jum'at karena sesuatu *udzur* atau lainnya, maka disunatkan untuk shalat Zhuhur berjamaah.

408. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Tanpa *Mustauthin* dan *Muqimin*

Di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, banyak kantor, pertokoan, kawasan industri dan kompleks perumahan yang menyelenggarakan shalat Jum'at. Jamaah shalat Jum'at terdiri dari para pegawai/karyawan atau orang-orang yang tidak tergolong penduduk asli atau berdomisili di tempat tersebut (*mustauthin*). Kalau pun ada *mustauthin* jumlahnya sedikit.

S: Bagaimana hukum shalat Jum'at tanpa *mustauthin* dan *muqimin* atau ada *mustauthin*, tetapi tidak mencukupi syarat, seperti yang terjadi di hotel-hotel dan restoran-restoran di kota Jakarta dan Surabaya?

J: Shalat Jum'at tanpa *mustauthin* dan *muqimin* atau dengan *mustauthin* dan *muqimin*, tetapi tidak memenuhi syarat, hukumnya *tafshil*:

- a. Tidak sah, menurut mayoritas ulama Syafi'iyyah. Sementara Imam Syafi'i sendiri dalam *qaul qadim* yang dikuatkan oleh al-Muzanni memandang sah bila jumlah jamaah itu diikuti *mustauthin* minimal 4 orang.

⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 382.

b. Imam Abu Hanifah mengesahkan secara mutlak.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*⁵

(فَرْعٌ) لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ عِنْدَنَا لِلْعَبِيدِ وَلَا الْمُسَافِرِينَ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ

Menurut mayoritas ulama, tidak sah shalat Jum'at bagi budak dan musafir, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengesahkannya.

2. *Risalah Bulugh al-Ummiyah fi Fatawa al-Nawazil al-'Ashriyah*⁶

بَلْ قَالَ شَيْخُنَا فِي تَقْرِيرِهِ عَلَى إِعَاتِيهِ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ قَدِيمَيْنِ فِي الْعَدَدِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا أَقْلُهُمْ أَرْبَعَةٌ. حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ التَّلْخِصِ وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ

Bahkan guruku, al-Bakri bin Muhammad Syaththa, dalam catatan atas kitab *I'arah al-Thalibinnya* berkata: "Sungguh Imam Syafi'i punya dua *qaul qadim* tentang jumlah jamaah shalat Jum'at pula. Salah satunya adalah minimal empat orang. Pendapat ini dikutip oleh pengarang kitab *al-Talkhish* dan dihikeyatkan al-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab*.

3. *Al-Muhadzdzab*⁷

مِنْ شَرْطِ الْعَدَدِ أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا أحرارًا مُقِيمِينَ بِالْمَوْضِعِ فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ وَالْمُسَافِرُونَ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهُ لَا تَحِبُّ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمُ كَالصَّبِيَّانِ وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِمُقِيمِينَ غَيْرَ مُسْتَوِطِينَ فِيهِ وَجَهَانِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ لِأَنَّهُ تَلَزَمَهُمُ الْجُمُعَةُ فَانْعَقَدَتْ بِهِمُ كَالْمُسْتَوِطِينَ

Di antara syarat jumlah jamaah tersebut adalah, mereka terdiri dari laki-laki, merdeka dan menetap di suatu tempat. Adapun perempuan, budak dan musafir, maka shalat Jum'at tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, karena mereka tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at sehingga shalat itu pun tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, sama seperti anak-anak. Apakah shalat Jum'at itu sah dengan jamaah terdiri dari para *muqimin* (penduduk) yang tidak menetap. Dalam hal itu terdapat dua *wajh*; Abu Ali bin Abi Hurairah berpendapat: "Shalat

⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 382.

⁶ Muhammad Ali al-Maliki, *Risalah Bulugh al-Ummiyah fi Fatawa al-Nawazil al-'Ashriyah* pada *Inarah al-Duja Syarh Tanwir al-Hija Nadzm Safinah al-Naja*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 232.

⁷ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab* pada *al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 420.

Jum'at dengan mereka itu sah karena mereka berkewajiban shalat Jum'at, sehingga shalat itu menjadi sah, sama seperti para penduduk tetap."

4. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*⁸

وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصَحِّ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْإِمَامِ، وَلَوْ كَانُوا مُسَافِرِينَ
أَوْ مَرْضَى لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا هُوَ الثَّلَاثُ

Dan jumlah minimal jamaah Jum'at menurut Abu Hanifah dan Muhammad dalam pendapat *al-Ashah* adalah tiga orang selain imam, walaupun mereka itu musafir dan orang sakit, karena minimal jumlah jamak yang sah itu adalah tiga.

409. Pemindahan Komplek Makam

Dengan berbagai macam alasan, dewasa ini makin banyak kompleks makam atau makam seseorang dipindah ke tempat lain.

S: *Bagaimana hukum pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke tempat lain?*

J: Pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke tempat lain hukumnya *tafshil*:

- a. Pemindahan makam ke tempat lain haram hukumnya, kecuali menurut mazhab Hanafi.
- b. Memindah mayat seseorang dari makamnya ke tempat lain menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram, kecuali karena darurat. Sedangkan menurut mazhab Maliki hukumnya boleh dengan syarat:
 - 1). Tidak terjadi kerusakan pada tubuh mayat;
 - 2). Tidak menurunkan martabat mayat;
 - 3). Pemindahan tersebut atas dasar maslahat.

Keterangan, dari kitab:

1. *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*⁹

وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْحَنِفِيَّةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ آلَ إِلَى
السُّقُوطِ فَيُبَدِّلُهُ بِمَحَلٍّ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ

Menurut kami (mazhab Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf, berbeda dengan ulama Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah,

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid II, h. 275.

⁹ Al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah al-Kubra, 1332 H), Jilid II, h. 170.

ada suatu tempat yang nyaris runtuh, lalu diganti dengan tempat lain yang lebih bagus setelah ada keputusan hakim yang mengabsahkan penggantian itu.

2. *Fath al-Wahhab*¹⁰

وَحَرَّمَ نَبْشُهُ قَبْلَ الْيَلَىٰ عِنْدَ أَهْلِ الْحَبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ بَعْدَ دَفْنِهِ لِتَقْلٍ وَغَيْرِهِ كَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِيهِ هَتَكًا لِحُرْمَتِهِ إِلَّا لِضُرُورَةٍ كَدَفْنٍ بِلَا طَهْرٍ مِنْ غُسْلٍ أَوْ تَيْمُمٍ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ طَهْرُهُ

Haram membongkar kuburan sebelum mayat hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya setelah penguburannya, untuk dipindahkan ataupun lainnya, seperti mengkafani dan menyalati. Sebab dalam hal itu terdapat kerusakan terhadap kehormatan mayat. Kecuali karena darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan dengan dimandikan atau tayamum, sedangkan mayat itu termasuk orang yang harus disucikan.

3. *Nihayah al-Zain*¹¹

وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُسَبَّلَةً لِلدَّفْنِ وَهِيَ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ فِيهَا حَرَمَ الْبِنَاءِ وَهَدْمَ

Seandainya tanahnya berupa pekuburan yang diperuntukkan umum, yaitu tanah yang kebiasaan pemakaman penduduk daerah itu di situ, maka haram mendirikan bangunan di atasnya dan harus dirobohkan.

4. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*¹²

الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالُ نَقْلِهِ ثَانِيهَا أَنْ لَا تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ بِأَنْ يُنْقَلَ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ فِيهِ تَحْقِيقٌ لَهُ قَالِئُهَا أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ بِمَصْلَحَةٍ ... فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثِ حَرَّمَ نَقْلُهُ

Ulama Maliki berpendapat, boleh memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari satu tempat ke tempat lain dengan tiga syarat; pertama mayat tidak pecah (rusak) ketika dipindah, *kedua* tidak sampai menodai kehormatannya, yaitu memindahkannya dengan cara yang di dalamnya terdapat penghinaan baginya, *ketiga* kepindahannya karena suatu maslahat. ... Jika satu syarat dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka haram memindahkannya.

¹⁰ Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab* pada *Futuh al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 211.

¹¹ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 155.

¹² Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 505-506.

410. Nikah Mut'ah

Secara lughawi nikah mut'ah berarti *al-damm wa al-jam'* (penggabungan dan pengumpulan) atau *al wath'u* (persetubuhan). Secara istilah nikah adalah ikatan perjanjian ('*aqd*) yang telah ditetapkan Allah untuk melegitimasi pemilikan seorang laki-laki atas upaya *istimta'* terhadap wanita yang bukan *mahramnya*. Selain ibadah, nikah merupakan wujud sikap *ta'awun* antara individu, pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi.

Jumhur fuqaha berpendapat, ada 4 macam nikah *fasidah* (rusak, tidak sah), yakni nikah *syighar* (tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar), nikah *mut'ah* (dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam '*aqd*), nikah yang dilakukan terhadap seorang wanita yang dalam proses *khitbah* (pinangan) laki-laki, dan nikah *muhallil* (siasat penghalalan menikahi mantan istri yang dithalaq bain). Namun ada juga yang menghalalkan nikah mut'ah, dengan dasar surat al-Nisa' ayat 24 yang artinya: "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah al-ujr [biaya kontrak] kepada mereka.*" Selain itu dasar penghalalannya adalah hadits Nabi Saw. yang meriwayatkan, ketika perang Tabuk para sahabat diperkenankan menikahi wanita dengan sistem kontrak waktu.

Ada titik singgung antara nikah *mut'ah* dan nikah biasa. Pertama, pada nikah *mut'ah*, batas waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, pada nikah biasa, dikenal istilah *thalaq* (cerai) untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

S: Nikah *mut'ah* bila dikaitkan dengan titik singgung waktu yang diperpanjang melalui kesepakatan kedua belah pihak dan titik singgung mengakhiri ikatan pernikahan melalui *thalaq* pada pernikahan biasa, mengingat semakin maraknya prostitusi, perselingkuhan, dipersulitnya poligami dan kemampuan ekonomi yang semakin meningkat dan memicu meningkatnya hubungan seksual di luar nikah, bagaimana hukum nikah *mut'ah* tersebut?

J: Nikah *mut'ah* menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah (batal).

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Umm*¹³

وَكَذَا كُلُّ نِكَاحٍ إِلَى وَاقْتِ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ فَالْتَّكَاحُ مَفْسُوخٌ لَا مِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

¹³ Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid V, h. 86.

وَلَيْسَ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْأَزْوَاجِ طَلَاقٌ

Demikian halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun *thalaq* antara kedua pasutri.

2. *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*¹⁴

(السُّؤَالُ) تَزَوَّجَ بِعَقْدٍ وَبِشُهُودٍ لِمُدَّةٍ مُخَدَّدَةٍ فَمَا حُكْمُ هَذَا الزَّوَاجِ شَرْعًا (الْجَوَابُ) هَذَا الزَّوَاجُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ شَرْعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْهِدَايَةِ وَالتَّكَاحِ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ. وَفِي مَنَاجِزِ الْجَلِيلِ وَفَسِيخِ التَّكَاحِ لِأَجَلٍ مُسَمًّى وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ. وَفِي الْمُغْنِيِّ لِابْنِ قُدَامَةَ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بَعَيْنِهِ لَمْ يَنْعَقِدِ التَّكَاحُ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ التَّكَاحِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ

Pertanyaan: "Seseorang kawin dengan akad dan saksi untuk masa tertentu, maka bagaimanakah hukum perkawinan ini menurut syar'i."

Jawaban: "Nikah temporer ini batal secara *syar'i*. Seperti pendapat *Jumhur* ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dan dalam kitab *Minah al-Jalil* disebutkan, nikah yang ditentukan untuk masa tertentu itu dirusak, meskipun setelah lewan masa itu, dan pernikahan tersebut termasuk nikah *mut'ah*. Dalam *al-Mughni* karya Ibn Qudamah disebutkan: "Bila ada lelaki mengawini perempuan untuk diceraikan pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena syarat itu mencegah kelanggengan perkawinan, maka serupa dengan nikah *mut'ah*."

3. *Rahmah al-Ummah*¹⁵

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ وَصَفَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ وَيَقُولُ زَوَّجْتُكَ إِلَى شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا

Para ulama bersepakat, bahwa nikah *mut'ah* itu tidak sah tanpa ada perselisihan pendapat antara mereka. Bentuknya adalah, seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: "Aku mengawini kamu untuk masa satu bulan, satu tahun dan semisalnya."

¹⁴ Hasanain Muhammad Makhluf, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1965), Jilid II, h. 7.

¹⁵ Abu Abdillah al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah* pada *al-Mizan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1965), Juz II, h. 39.

Perkawinan ini tidak sah dan telah dihapus oleh *ijma'* para ulama masa lalu dan sekarang.

4. Referensi Lain

- a. *I'ana al-Thalibin*, Juz III, h. 278 - 279.
- b. *Al-Mizan al-Kubra*, Juz II, h. 113.
- c. *Al-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, Juz VII, h. 224.

411. Bai'ud Dain (Jual Beli Piutang)

Si A berhutang pada B. Perjanjian hutang-piutang tersebut dikuatkan dalam akte perjanjian hutang-piutang. Karena mendesaknya kebutuhan, sebelum jatuh tempo oleh B, akte perjanjian hutang-piutang itu dijual kepada C. Berdasarkan akte perjanjian hutang-piutang itu C menagih kepada si A.

S: Bagaimana hukum jual beli hutang-piutang (*bai' al-dain*)? Misalnya si A berhutang kepada si B. Perjanjian hutang-piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang-piutang. Karena terdesak kebutuhan, sebelum jatuh tempo, akte perjanjian hutang-piutang tersebut dijual kepada si C. Berdasarkan akte perjanjian tersebut si C menagih kepada si A?

J: Jual beli hutang-piutang (*bai' al-dain*) seperti tersebut di atas hukumnya boleh, jika nilainya sama. Dan jika nilainya berkurang, hukumnya tidak boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'*¹⁶

وَيَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِغَيْرِ دَيْنٍ لِّغَيْرٍ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَأَنْ بَاعَ بَكْرٌ لِعَمْرٍو مِائَةً لَهُ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ
كَبَيْعِهِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ رُجِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ الْبُطْلَانُ

Sah menjual hutang dengan selain hutang kepada orang lain yang tidak punya kewajiban atasnya, seperti Bakar menjual kepada Umar hutang senilai seratus yang menjadi kewajiban Zaid dengan nilai seratus pula. Pendapat ini diunggulkan dalam *al-Raudhah*, berbeda dengan *al-Minhaj* yang tidak mengesahkannya.

2. *Bughyah al-Mustarsyidin*¹⁷

¹⁶ Muhammad Khatib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), Juz I, h. 280.

¹⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 131.

(مَسْأَلَةٌ ك) لَا يَصَحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَنْقَصَ مِنْهُ حَالًا مِنْ جَنْسِهِ مِنَ الْمَدِينِ رَبَوِيًّا أَوْ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةِ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خُمْسَةِ حَالَةٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ النِّقْصَ فِي مُقَابَلَةِ الْحُلُولِ وَهُوَ لَا يَحِلُّ

(Kasus dari Muhammad Sulaiman al-Kurdi) Tidak sah menjual hutang bertempo dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah dari jenis hutang tersebut secara kontan kepada orang yang menghutangi, baik berupa barang *ribawi* atau selainnya. Seperti akad *shulh* (damai) dari 10 yang ditempo pada 5 secara kontan. Sebab, ia menjadikan kekurangannya sebagai imbal balik dari pembayaran kontannya dan hal itu tidak halal.

3. *Al-Mizan al-Kubra*¹⁸

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ التَّجَشُّسِ وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْدَّيْنِ هَذَا مَا وَجَدْتُهُ مِنْ مَسَائِلِ الْإِتِّفَاقِ

Dan begitu pula para ulama sepakat atas keharaman *najsy* (menawar dengan bertujuan agar orang lain menawarnya dengan harga yang lebih dari semestinya) dan atas *bai' al-kali' bi al-kali'*, yaitu keharaman menjual hutang dibeli dengan hutang. Inilah sebagian kasus yang disepakati ulama yang aku temukan.

4. *Referensi Lain*

a. *Sullam al-Taufiq*, h. 53.

412. *Bai'ul 'Inah* (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari Berhutang Kepada Pemberi Hutang)

Si A berhutang suatu barang kepada B, seharga Rp. 100.000,00. Setelah menerima barang itu, A menjual barang tersebut kepada B seharga Rp. 75.000,00.

S: Bagaimana hukum menjual barang yang berasal dari berhutang kepada yang memberinya hutang (*bai' al-'inah*)?

J: Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab berpendapat bahwa hukum *bai' al-'inah* sah, namun *makruh tanzih*. Sedangkan imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan.

Keterangan, dari kitab:

¹⁸ Abdul Wahhab al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 72.

1. *Al-Mizan al-Kubra*¹⁹

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِجَوَازِ بَيْعِ الْعَيْنَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ... مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ بَعْدَ جَوَازِ ذَلِكَ

Dan termasuk yang diperselisihkan ulama adalah pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan *bai'u al-'inah* (menjual kembali barang yang sudah dibeli secara berhutang kepada pemilik barang semula yang menghutangnya) beserta hukum makruh, ... serta pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, tentang ketidakbolehannya.

2. *Al-Anwar li A'mal al-Abrar*²⁰

وَلَيْسَتْ الْعَيْنَةُ مِنَ الْمَنْهَاجِ الْمَحْرَمَةِ وَلَا الْمَكْرُوهَةِ إِنْ لَمْ يُعْتَدَّ وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مُوَجَّلًا وَيُقْبِضَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ نَقْدًا بِأَقْلَ مِنْ ذَلِكَ

Jual beli *'inah* tidak termasuk larangan-larangan yang diharamkan dan bukan yang dimakruhkan, jika tidak dibiasakan. Pengertian jual beli *'inah* adalah seseorang menjual sesuatu secara kredit, dan menyerahkannya kepada pembeli, lalu ia membelinya lagi secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga awal.

3. *Hadits Abu Dawud*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Dari Ibn Umar, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Jika kalian melakukan jual beli secara *'inah*, mengambil ekor sapi (sibuk membajak sawah), rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah Swt. akan menimpakan kehinaan terhadap kalian yang tidak akan dicabutNya sampai kalian kembali ke agama kalian." (HR. Abu Dawud).

413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang Berhutang Belum Melunasi

Si A berhutang kepada B sejumlah uang, dengan agunan/jaminan sebidang tanah. Selama A belum mampu melunasi hutangnya, B berhak menanam tanah A.

S: Bagaimana hukum memanfaatkan sebidang tanah agunan /jaminan selama

¹⁹ Abdul Wahhab al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 70.

²⁰ Yusuf al-Ardabili, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 229.

orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya?

J: Menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai, hukumnya haram, sebab barang agunan hanya sekedar *borg* (jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*).

Keterangan, dari kitab:

1. *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*²¹

وَكَشَرَطِ مَنْفَعَةِ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ أَنَّ تَحَدُّثَ زَوَائِدِهِ كَثْمَرَةَ الشَّجَرَةِ وَنَتَاجَ الشَّاةِ
مَرْهُونَةٌ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ وَلَا الشَّرْطُ. أَفَادَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ

Dan seperti penyaratan pemanfaatan barang gadai bagi pihak yang menghutangi, atau niscaya tambahan-tambahan barang gadai seperti buah dari suatu pohon dan anak dari seekor kambing ikut digadaikan, maka akad gadai dan syarat tersebut tidak sah. Begitu penjelasan Syaikh Zakaria al-Anshari dala *Syarh Manhaj al-Thullab*.

2. *Fath al-Mu'in*²²

(وَيَصِحُّ الرَّهْنُ) وَهُوَ جَعْلُ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثَبَتَ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ فَلَا
يَصِحُّ رَهْنٌ وَقِفٌ وَأَمٌّ وَلَدٌ ... (لَا) يَصِحُّ (بِشَرْطِ مَا يَضُرُّ) الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ ... (وَكَشَرَطِ
مَنْفَعَتِهِ) أَيِ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ

Dan akad gadai itu sah, yaitu menjadikan suatu barang yang boleh diperjualbelikan sebagai agunan hutang yang akan dilunasi dari barang tersebut ketika tidak bisa melunasinya. Maka tidak sah menggadaikan barang wakaf dan budak *umm walad* (budak wanita yang melahirkan anak majikannya). ... Akad gadai tidak sah dengan sebab persyaratan yang merugikan pihak yang menggadaikan atau yang menerima gadai. ... Dan seperti menyaratkan pemanfaatan barang yang digadaikan bagi pihak yang menerima gadai (pemberi hutang).

3. *Fath al-Mu'in*²³

قَالَ شَيْخُ مَشَائِخِنَا الْعَلَامَةُ الْمُحَقِّقُ الطَّنْبَدَاوِيُّ فِيمَا إِذَا نَذَرَ الْمَدْيُونُ لِلدَّائِنِ مَنْفَعَةً

²¹ Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah al-Kubra, 1332 H), Juz II, h. 123.

²² Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* pada *I'alah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.), Jilid IV, h. 37-38.

²³ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* pada *I'alah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 370.

الأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ مُدَّةَ بَقَاءِ الدِّينِ فِي ذِمَّتِهِ. وَالَّذِي رَأَيْتُهُ لِمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا الْيَمَنِيِّينَ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الصَّحَّةِ وَمِمَّنْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ الْبِقَاطِ وَالْعَلَّامَةُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَهْدَالِ

Syaikh Masyayikhina al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Thanbadawi berkata tentang hukum kasus ketika pihak penghutang bernadzar memberi penghasilan sebidang lahan yang digadaikan bagi pihak pemberi hutang selama hutang tersebut masih dalam tanggungannya: "Pendapat yang aku lihat dari generasi akhir madzhab Syafi'i bangsa Yaman adalah kejelasan atas keabsahannya. Sebagian ulama yang berfatwa demikian adalah Syaikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qimath dan al-'Allamah al-Husain bin Abdirrahman al-Ahdal."

4. *Bughyah al-Mustarsyidin*²⁴

(مَسْأَلَةُ ش) رَهْنَ أَرْضًا وَأَبَاحَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ مَنَافِعَهَا مُدَّةَ بَقَاءِ الدِّينِ إِنْتَهَتْ الْإِبَاحَةُ بِمَوْتِ الْمُسِيحِ فَيَغْرُمُ الْمَنَافِعَ مِنْ حِينَئِذٍ

(Kasus dari Muhammad bin Abi Bakr al-Asykar al-Yamani) Bila seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan pihak penerima gadai atau yang lainnya untuk mengambil penghasilannya selama hutang belum terbayar, maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya pemilik tanah. Maka sejak itu pihak penerima gadai atau orang lain tersebut harus bertanggungjawab atas penghasilan tanah tersebut.

5. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*²⁵

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ إِغْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنَزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُورُ لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ.

Bila sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? *Jumhur* ulama berkata: "Tidak diposisikan sebagai syarat." Sedangkan al-Qaffal berpendapat: "Ya (diposisikan sebagai syarat)."

²⁴ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 178.

²⁵ Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H), h. 67.

414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis Orang Lain

Belakangan ini banyak karya ilmiah ulama masa lalu diterbitkan kembali baik dalam bahasa aslinya maupun terjemahan.

S: a. *Bagaimana pandangan Islam tentang hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan seseorang?*

b. *Bolehkah karya ulama masa lalu diterbitkan tanpa sepengetahuan ahli waris mu'allif/mushanifnya atas dasar al-wijadah atau dengan dalih agar lebih bermanfaat?*

J: 1. Hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi *tirkah* bagi ahli warisnya, sebagaimana keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 28 di Krapyak Yogyakarta tahun 1989, masalah nomor 389.

2. Mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain hukumnya haram, kecuali ada izin dari pemilik hak/pengarang/penulis atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta tersebut.

3. Apabila pemilik hak/pengarang/penulis atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta sudah tidak ada, maka hak cipta karya tulis tersebut menjadi hak kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka secara umum.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Fatawa al-Haditsiyah*²⁶

وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِتَحْصِيلِ الْكُتُبِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا مَا أَمَكَّنَهُ بِشِرَاءٍ وَإِلَّا فَبِأُجْرَةٍ أَوْ غَارِيَةٍ وَلَا يَشْتَغِلُ بِنَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا مَا يَتَعَدَّرُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ النَّسْخِ ... وَلَا يَنْسَخُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِذْ مُطْلَقُ الاسْتِعَارَةِ لَا تَتَنَاوَلُ النَّسْخَ إِلَّا إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِكُ لِيَتَنَفَّعَ بِهِ كَيْفَ شِئْتَ وَلَا بَأْسَ بِالنَّسْخِ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَنْتَفِعُ كِتَابَهُ

Dan harus diusahakan memperoleh kitab-kitab yang dibutuhkan, sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak mungkin maka dengan menyewa atau meminjam. Dan hendaknya tidak melakukan penyalinan kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa menyalinnya kembali. ... Dan tidak boleh menyalin kecuali dengan izin pemiliknya, karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup (izin) penyalinan, kecuali si pemilik berkata: "Silakan manfaatkan buku itu sebagaimana

²⁶ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Haditsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 163.

yang Anda inginkan." Dan boleh menyalin kitab yang diwakafkan bagi orang yang bisa memanfaatkannya.

2. *Bughyah al-Mustarsyidin*²⁷

(مَسْأَلَةٌ ج) اِسْتَرَدَّ مَالاً مِنْ غَاصِبٍ وَاَيْسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ كَانَ لِيَبِيْتِ الْمَالِ ثُمَّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَامَّةِ وَاَمَانَ الطَّرِيقِ وَنَحْوَهَا

(Kasus dari 'Alawi bin Saqqaf bin Muhammad al-Ja'fari al-'Alawiyun al-Hadhramiyun) Jika seseorang mengambil harta dari seseorang yang menguasainya tanpa izin, dan ia putus asa untuk mengetahui pemiliknya, maka harta itu diberikan ke *bait al-mal*, lalu untuk kepentingan umum umat Islam, keamanan jalan dan semisalnya.

3. *Madkhal al-Fiqh al-'Amm*²⁸

وَهَذَا التَّقْسِيْمُ لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ مَفْهُومِ الْمَالِ بِالنَّظَرِ الشَّرْعِيِّ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ بَحْثُنَا فَقَدْ فَرَّقَ فِقْهُنَا بَيْنَ الْمَالِ وَالْمِلْكِ. فَاعْتَبَرَ الْحَقُوقُ وَالْمَنَافِعُ مِلْكًا يُسْتَمْتَعُ بِهِ لَا مَا لَا تَرُدُّ عَلَيْهِ الْعُقُودُ إِلَّا اسْتِثْنَاءً كَمَا تَقَدَّمَ

Dan pembagian ini tidak sesuai dengan pengertian harta menurut pandangan *syara'* yang menjadi landasan pembahasan kita. Fiqh yang kita anut telah membedakan antara harta dan hak milik. Maka hak dan manfaat-manfaat dianggap sebagai hak milik yang bisa dinikmati. Bukan sebagai harta yang bisa dijadikan obyek berbagai akad, kecuali yang dikecualikan sebagaimana uraian sebelumnya.

4. *Hasyiyah Qulyubi*²⁹

قَوْلُهُ تَرَكَهُ هِيَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَاخْتِصَاصٍ وَلَوْ خَمْرًا تَخَلَّلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَدَّ قَذْفٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ صَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا قَبْلَهُ

(Harta pusaka) adalah yang ditinggalkan oleh mayit, meski dengan sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti *ikhtishash* (barang yang tidak bisa dimiliki namun boleh digunakan seperti pupuk kandang dan semisalnya), atau meski dalam bentuk *khamr* yang kemudian berubah menjadi cuka setelah kematiannya, atau *had* menuduh zina, atau buruan

²⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 159.

²⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), h. 232.

²⁹ Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi* pada *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Juz III, h. 135.

yang masuk dalam jaring yang telah dipasang sebelum kematiannya.

5. *I'annah al-Thalibin*³⁰

الْزَّكَاةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حَقٍّ

Harta pusaka adalah peninggalan mayit berupa harta atau hak.

415. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

Penyakit Aids (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh. Penyebab AIDS adalah kuman HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Dewasa ini AIDS sudah menjadi masalah sosial dan kemanusiaan, karena sifatnya yang mematikan dan belum diketemukan obat untuk menyembuhkannya dan vaksin untuk mencegah penularannya.

Karena virus HIV dapat berada dalam darah, cairan vagina dan sperma, maka penularan dan penyebaran dapat terjadi melalui:

- a. *Sexual* (hubungan kelamin);
- b. *Parenteral* (melalui alat tusuk/suntik), darah dan produk darah yang tercemar HIV;
- c. *Perinatal* (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya).

Sebagian besar (90 %) penularan HIV terjadi secara seksual, selebihnya terjadi secara parenteral dan perinatal. Berbeda dengan penyakit lain, pengidap HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan, karenanya menurut perhitungan medis pengidapnya pasti mati. Hanya saja, dari HIV menjadi AIDS melalui beberapa stadium dalam kurun waktu yang cukup lama, yang memungkinkan penularannya kepada orang lain.

S: a. Bagaimana hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, baik dengan sesama pengidap maupun bukan?

b. Bagaimana cara memandikan jenazah pengidap HIV/AIDS?

c. Mengingat belum diketemukannya obat penyembuh, beban psikologis penderita dan kemungkinan penularannya, bagaimana hukum euthanasia (tindakan mengakhiri hidup) pengidap HIV/AIDS?

J: a. Pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan sesama pengidap maupun bukan, hukumnya sah namun makruh.

b. Jenazah pengidap HIV/AIDS tetap dimandikan sebagaimana

³⁰ Muhammad Syaththa al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid III, h. 223.

biasa dengan memperhatikan petunjuk dokter/ahlinya. Jika dikhawatirkan terjadi penularan, maka ditayammumi.

c. Hukum euthanasia (tindakan mengakhiri hidup) ialah haram.

Keterangan, dari kitab:

1. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*³¹

يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا بِالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ غَيْرَ الْحَادِثَيْنِ لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِكُلِّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَتَعَدَّى إِلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا

Begitu pula bagi wali wanita boleh memfaskh (merusak) akad nikah dengan sebab penyakit kusta dan lepra yang sudah lama diderita suami. Sebab mereka bisa menerima aib dengan masing-masing kedua penyakit itu dan sebab aib penyakit tersebut bisa menjalar kepada si wanita dan keturunannya.

2. *Hadits Nabi Saw.*

قَوْلُهُ ﷺ فَرِّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Nabi Saw. bersabda: "Larilah dari penderita lepra seperti larimu dari singa."

3. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*³²

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَأَمَّا الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ فَإِنَّهُ أُنَى كُلِّ مِنْهُمَا يَعْدِي الزَّوْجَ وَيَعْدِي الْوَلَدَ ... وَالْوَلَدُ قَلَّ مَا يَسْلَمُ مِنْهُ

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i berkata: "Adapaun lepra dan kusta, maka sungguh masing-masing dari keduanya bisa menular kepada suami (atau ke istri) dan anak. ... Adapun anak, maka sedikit sekali yang selamat dari (penularan) penyakit tersebut.

4. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*³³

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ لِعَيْبِهِ كَأَنِ اخْتَرَقَ أَوْ لِدَغٍ ... أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَائِلِ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ التَّحَفُّظُ (يُمَمَّ) وَجُوبًا قِيَاسًا عَلَى غَسْلِ الْجَنَابَةِ

(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya, seperti terbakar atau terkena racun binatang ... atau dikhawatirkan

³¹ Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 176.

³² Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 203.

³³ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 358.

orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah- dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-, maka (jenazah itu ditayammumi) secara wajib, karena men^qiyaskan pada mandi *jinabah*.

5. *Al-Hawasyi al-Madaniyah*³⁴

وَحَيْثُ تَعَدَّرَ غَسْلُهُ بِأَنْ أَدَّى إِلَى تَهْرِيهِ يُمِّمْ وَجُوبًا (قَوْلُهُ بِأَنْ أَدَّى إِلَى تَهْرِيهِ) أَنِّي لِنَحْوِ خِرْقَةٍ أَوْ لَدَغٍ أَوْ خِيفَةٍ عَلَى الْغَاسِلِ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ التَّحْفُظُ

Dan sekiranya sulit untuk memandikan jenazah, yaitu akan membuatnya rontok -bila dimandikan-, maka jenazah itu wajib ditayammumi.

(Ungkapan penulis: "Yaitu akan membuatnya rontok."), maksudnya seperti sebab luka bakar, digigit binatang beracun atau dikhawatirkan orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah- dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-.

6. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*³⁵

(وَأَجَلَ النَّفْسِ مِنَ الرُّهُوقِ) لِلرُّوحِ (وَعِغْرَهَا مِنَ الْجِنَايَةِ)

(Masa -pembayaran *diyat*- pembunuhan jiwa dimulai dari keluarnya) ruh, (dan -masa pembayaran *diyat* dari selain pembunuhan jiwa dimulai dari -permulaan- terlukai).

7. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*³⁶

يُشْتَرَطُ فِي الْعَمْدِ أَنْ يَكُونَ ظُلْمًا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مُرَهَّقًا لِلرُّوحِ بِخِلَافِ غَيْرِ الظُّلْمِ ... (وَهُوَ) أَيِ الْعَمْدِ فِي النَّفْسِ (قَصْدُ لِلْفِعْلِ) الْعُدْوَانِ (وَ) عَيْنِ (الشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلُ) قَطْعًا أَوْ (غَالِبًا)

Dalam pembunuhan *al-'amd* -secara sengaja- disyaratkan pembunuhan itu merupakan kezaliman dari sisi pembunuhan itu menghilangkan ruh. Berbeda dengan pembunuhan yang bukan merupakan kezaliman ... (Dan pembunuhan itu), maksudnya kesengajaan membunuh seseorang (adalah bermaksud melakukan tindakan) jahat, (pada tubuh seseorang dengan alat yang bisa membunuh) secara pasti (atau pada umumnya).

³⁴ Sulaiman al-Kurdi, *al-Hawasyi al-Madaniyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H), Juz II, h. 71.

³⁵ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin* pada *Hasyiyata Quhyubi wa 'Umairah*, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 156.

³⁶ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 4 dan 5.

وَأَنْ لَا يَشْتَدَّ الْأَلَمُ وَيَبْقَى إِلَى الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عَمْدٌ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ... (وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) أَوْ أَحَدَهُمَا (و) مَنَعَهُ أَيضًا (الطَّلَبُ) لِذَلِكَ (حَتَّى مَاتَ) بِسَبَبِ الْمَنَعِ (فَإِنْ مَضَتْ) عَلَيْهِ (مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ) أَيْ الْمَخْبُوسِ (فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَعَمْدٌ) لِيُظْهَرَ قَصْدُ الْإِهْلَاكِ بِهِ

Dan -termasuk syarat pembunuhan *syibh al-'amd* seperti membunuh dengan cambuk atau tongkat kecil- sakitnya tidak parah dan sampai mati. Maka bila dalam kasus itu terdapat sebagian hal tersebut maka kasus itu merupakan pembunuhan *'amd* -secara sengaja-. Sebab pembunuhan itu pada umumnya bisa membuat orang terbunuh. ... (Dan bila seseorang memenjara korban dan mencegahnya dari makanan dan minuman) atau salah satunya, (dan) dan mencegahnya pula dari (mencari) makanan, minuman atau salah satunya (sehingga mati) dengan sebab pencegahan itu, (maka bila telah lewat) baginya (suatu masa yang orang semisalnya bisa mati), maksudnya orang seperti korban yang dipenjara itu, (dalam masa itu secara umum karena kelaparan atau kehausan, maka kasus itu merupakan pembunuhan *'amd* -secara sengaja-), karena begitu jelasnya tujuan membunuh dengan tindakan pencegahan tersebut.

416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis

Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup manusia, maka kebutuhan hidup manusia terhadap insulin semakin bertambah. Karena secara alami, dengan bertambahnya usia, maka fungsi pankreas akan semakin menurun. Dengan menurunnya fungsi pankreas, maka menurun pula fungsi insulin yang dapat dihasilkan tubuh manusia. Dengan menurunnya insulin dalam tubuh manusia, maka kemampuan tubuh manusia untuk memecah gula dalam darah akan semakin turun. Pada saat itulah manusia terkena penyakit yang disebut kencing manis (diabetes melitus), dan memerlukan suntikan insulin.

Pernah dicoba membuat insulin dari ekstraksi pankreas sapi. Namun hasilnya kurang menggembirakan, meskipun gennya cocok dengan sapi. Dari seekor sapi, hanya dihasilkan insulin 1/2 cc saja, yang berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik.

³⁷ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid V, h. 14 dan 15.

Percobaan pembuatan insulin dari pankreas kera, menunjukkan gennya tidak cocok dengan manusia. Akhirnya dicoba membuat insulin dengan ekstraksi pankreas babi, dan ternyata hasilnya selain gennya cocok dengan manusia, jumlah cc-nya pun mencukupi.

Mula-mula insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam bakteri. Dalam waktu 24 jam, dari satu gen menghasilkan milyaran gen. Kini insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi. Karena organisme ragi lebih kompleks dari bakteri, maka hasilnya lebih baik. Dari satu gen pankreas babi yang diklon dalam ragi pada tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin dari bahan dan proses seperti itulah yang kini beredar di seluruh dunia.

S: Bagaimana hukum penggunaan insulin yang terbuat dari pankreas babi guna penderita kencing manis (*diabetes melitus*)?

J: Hukumnya boleh, jika tidak ditemukan obat lain dari bahan yang suci.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*³⁸

وَأَمَّا التَّدَاوِي بِالتَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهِيَ جَائِزٌ سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ التَّجَاسَاتِ غَيْرُ الْمُسْكِرِ
هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ

Adapun berobat dengan bahan-bahan najis selain *khamr* itu boleh. Hal ini berlaku pada seluruh jenis najis selain yang memabukkan. Ini adalah pendapat *al-Madzhab*, *al-Manshush* dan *Jumhur* ulama memastikannya (sebagi keputusan hukum tunggal).

3. *Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'*³⁹

وَأَمَّا أَمْرُهُ ﷺ الْعُرَيْنَيْنِ بِشَرْبِ آبِ الْإِبِلِ فَكَانَ لِلتَّدَاوِي وَالتَّجِيسِ جَائِزٌ عِنْدَ
فَقْدِ الظَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْخَمْرِ

Dan adapun perintah Nabi Saw. kepada orang-orang suku 'Urainah agar meminum air kencing unta, maka hal itu untuk tujuan pengobatan.

³⁸ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IX, h. 45-46.

³⁹ Muhammad Khatib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'* pada *Tuhfah al-Habib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 313-314. Ibarah ini beliau sampaikan pula dalam kitab *Mughni Muhtaj*. Bukan merupakan kesimpulan Mukhtamir. Lihat, Muhammad Khatib al-Syirbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz I, h. 233. (Pen.)

Sementara pengobatan dengan obat najis itu boleh ketika tidak menemukan obat suci yang bisa menggantikannya. Dan Adapun sabda Nabi Saw.: "Allah Swt. tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam obat yang Ia haramkan bagi mereka.", maka dipahami untuk *khamr* (saja).

2. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*⁴⁰

وَيُظْهَرُ كُلُّ نَجَسٍ اسْتَحَالَ حَيَوَانًا كَدَمٍ بَيْضَةٍ اسْتَحَالَ فَرْخًا عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ وَلَوْ كَانَ دُودًا
كَلْبٍ لِأَنَّ لِلْحَيَاةِ أَثَرًا بَيِّنًا فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَنْظَرُ بِزَوَالِهَا وَلِأَنَّ الدُّودَ مُتَوَلِّدٌ فِيهِ لَا مِنْهُ

Dan semua najis yang telah berubah bentuk menjadi hewan itu suci, seperti darah telur yang telah berubah menjadi anak ayam, menurut *qaul* yang menganggapnya najis, meski ulat dari anjing. Sebab, sifat hidup itu mempunyai dampak nyata dalam menghilangkan najis. Oleh karenanya, maka najis itu hilang karena hilangnya sifat hidup. Selain itu, karena ulat itu lahir dalam diri anjing, bukan berasal darinya.

3. *Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'*⁴¹

وَلَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ لِحَاجَةٍ بِنَجَسٍ مِنْ عَظْمٍ لَا يَصْلُحُ لِلْوُضَلِ غَيْرُهُ عُذْرٌ فِي ذَلِكَ
فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ

Dan bila seseorang menyambung tulangnya karena dibutuhkan, dengan tulang najis yang selainnya tidak layak untuk dijadikan penyambung, maka ia dianggap *udzur* dalam hal itu. Oleh karenanya, shalatnya sah beserta tulang tersebut (berada di tubuhnya).

4. *Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah*⁴²

وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَرَضًا مُحْوَفًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ كُلِّ مُبِيحٍ تَيَمَّمَ وَوَجَدَ مُحَرَّمًا غَيْرَ
مُسْكِرٍ كَمَيْتَةٍ وَلَوْ مُغْلَظَةً لَزِمَهُ أَكْلُهُ أَوْ شَرْبُهُ

Barangsiapa mengkhawatirkan keselamatan diri atau sakit yang bisa menyebabkan kematian, atau semisalnya dari semua perkara yang bisa menyebabkan boleh bertayammum, dan ia (hanya) menemukan barang haram namun tidak memabukkan, seperti bangkai meski dari binatang najis *mughallazhah*, maka ia wajib memakan atau meminumnya.

⁴⁰ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 83.

⁴¹ Muhammad Khatib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid I, h. 443.

⁴² Abdullah bin Sulaiman al-Jurhuza, *al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 117.

5. Referensi Lain

- a. *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz I, h. 201, 211 dan 296.
- b. *Nihayah al-Muhtaj*, Juz I, h. 174 dan 427.
- c. *Kanz al-Raghibin/ al-Mahalli*, Juz I, h. 199.
- d. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Iqna'*, Juz I, h. 296
- e. *Fatawa li al-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf*, Juz II, h. 164.

417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia

Istilah *klon* atau *clone* berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemangkasan (tanaman). Istilah ini semula digunakan untuk potongan/pangkas tanaman yang akan ditanam. Kini, dalam term ilmu pengetahuan kloning bibit unggul secara efektif dan efisien. berarti sebuah rekayasa genetika untuk mereproduksi makhluk organik secara asexual (tanpa diawali proses pembuahan sel telur oleh sperma, tapi diambil dari inti sebuah sel). Saat ini aplikasi kloning sudah mencakup bidang yang cukup luas, yakni kloning gen (kloning pada bakteri dan sel dalam kultur jaringan), kloning tanaman (buah, sayuran dan bunga) dan kloning hewan (katak, tikus dan domba). Manfaat kloning gen bagi kehidupan antara lain adalah untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen dan diagnosis penyakit genetik. Sedangkan kloning tanaman dan hewan sangat bermanfaat untuk mengembangbiakkannya yang digunakan sesuai kebutuhan manusia.

Kloning hewan pertama kali dicoba pada tahun 1950an pada katak. Kini selain pada tikus, kera dan bison, juga pada domba yang cukup mengejutkan. Kloning bison dilakukan dari sel bison yang sudah mati (fosil bison). Sedangkan kloning domba dilakukan dari sel domba yang masih hidup. Secara teoritik, kloning manusia (*human cloning*) juga bukan hal yang mustahil, baik dari sel manusia yang masih hidup maupun yang sudah mati, karena prosesnya tidak berbeda dengan kloning hewan. Untuk kloning manusia, sebagaimana kloning hewan, selain sel yang akan dikloning, harus ada ovum (sel telur) dan rahim. Tanpa ovum, tidak bisa dikloning. Dan tanpa rahim, sel yang dikloning pada ovum itu akan mati.

Kloning manusia ada dua cara. Cara pertama, sel langsung dikloning pada ovum. Setelah terjadi pembelahan, diambil satu langsung ditanam dalam rahim. Proses seterusnya seperti kehamilan pada umumnya. Cara kedua hampir sama dengan proses bayi tabung. Pertama-tama dilakukan pembuahan sperma atas ovum (sel telur) di luar rahim. Setelah terjadi

pembelahan (sampai maksimal 64 pembelahan), ditanam dalam rahim, sel intinya diambil dan diganti dengan sel inti manusia yang akan dikloning. Proses selanjutnya adalah sebagaimana kehamilan biasa. Namun demikian, baik melalui cara pertama maupun kedua, manusia hasil kloning tak akan persis sama dengan manusia yang dikloning, karena juga dipengaruhi oleh sperma (bagi cara kedua), ovum dan kondisi ibu yang mengandungnya. Kloning manusia juga dapat dilakukan untuk menghindarkan seseorang dari penyakit. Caranya, hasil pembuahan yang terdeteksi mengandung suatu penyakit diambil sel intinya kemudian diganti dengan sel lain yang sehat. Kemudian hasil pembuahan itu ditanamkan dalam rahim.

S: Bagaimana hukum kloning gen tanaman, hewan dan manusia?

- J: a. Pemanfaatan teknologi cloning gen pada tanaman diperbolehkan, karena hajat manusia untuk kemaslahatannya.
- b. Kloning gen pada hewan diperbolehkan dengan catatan dilakukan dalam rangka kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat.
- c. Adapun kloning gen pada manusia hukumnya haram.
- 1). Proses *tanasul* (berketurunan) harus melalui pernikahan secara syar'i.
 - 2). Bisa mengakibatkan kerancuan nasab.
 - 3). Penanamannya kembali ke dalam rahim tidak dapat dilakukan tanpa melihat aurat besar.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab*⁴³

(وَعَلَى الْعَامِلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ) إِصْلَاحِهِ وَتَنْمِيَّتِهِ (مِمَّا يَتَكَرَّرُ) مِنَ الْعَمَلِ
(كُلِّ سَنَةٍ كَسَفِي وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ) أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَخَوٍّ (وَإِصْلَاحِ أَجَاجِينَ) يَقِفُ
فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ لِيَشْرَبَهُ شَبَّهَتْ بِأَجَانَاتِ الْغَسِيلِ جَمْعُ إِجَانَةٍ (وَتَلْقِيحِ) لِلنَّخْلِ
(قَوْلُهُ وَتَلْقِيحِ لِلنَّخْلِ) وَهُوَ وَضْعُ طَلْعٍ ذَكَرٍ فِي طَلْعِ أُنْثَى

(Dan wajib bagi pekerja -dalam akad *musaqah*; penyiraman buah anggur dan kurma dengan hasil panennya dibagi antara kedua pihak) ketika dimutlakkan, (pekerjaan yang dibutuhkan buah) untuk kualitas dan perkembangannya, (dari yang berulang-ulang), maksudnya pekerjaan yang berulang-ulang, (setiap tahun, seperti menyiram dan membersihkan sungai), maksudnya saluran air dari lumpur dan semisalnya, (memperbaiki

⁴³ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 526-527.

ajjajin -galian tempat air- di sekitar pohon), yang menjadi tempat air di sekitar pohon agar diserapnya. *Ajjajin* itu diserupakan dengan beberapa wadah baju yang dibasuh, bentuk *jama'* dari kata *إِجَاتَه* (dan mengawinkan) kurma.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Mengawinkan kurma."), yaitu meletakkan mayang kurma jantan dalam mayang kurma betina.

2. *Shahih Muslim*⁴⁴

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْحِقُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْضًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ بِهِمْ مَا لِي تَخْلِكُكُمْ؟ قَالُوا قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Dari Anas Ra., sungguh Nabi Saw. melewati kaum yang sedang mengawinkan kurma. Lalu beliau Saw. bersabda: "*Seandainya kalian tidak melakukannya niscaya kurma itu akan baik.*" Anas Ra. berkata: "Ternyata kurma itu berbuah dengan buah muda jelek (yang saat kering berkualitas jelek pula)." Lalu Nabi Saw. melewati mereka kembali dan bersabda: "Apa yang terjadi pada kurma kalian?" Mereka menjawab: "Aku melakukan ini dan itu (sesuai anjuran Nabi Saw.)." Nabi Saw. bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." (HR. Muslim)

3. *Futuh al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab*⁴⁵

وَفِي الْمِصْبَاحِ ... وَقِيلَ الْمُرَادُ الضَّرَابُ نَفْسُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنْ تَنَاسَلَ الْحَيَوَانِ مَطْلُوبٌ لِذَاتِهِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فَلَا يَكُونُ التَّهْيُ لِذَاتِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ بَلْ لِأَمْرِ خَارِجٍ

Dan dalam kitab *al-Mishbah* ... Dan menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah mengawinkan hewan itu sendiri. Itu adalah pendapat yang lemah. Sebab, sungguh reproduksi hewan itu dianjurkan demi kemaslahatan manusia, maka tidak dilarang karena dzatnya, agar menolak kontradiksi dalil, namun karena unsur eksternal.

4. *Tarsiyh al-Mustafidin*⁴⁶

وَيُكْرَهُ إِنْزَاءُ الْحِمْرِ عَلَى الْحَيْلِ فَيُحْرَمُ إِنْزَاءُ الْحَيْلِ عَلَى الْبَقَرِ لِكِبَرِ الْأَلَةِ

Dan dimakruhkan mengawinkan keledai pada kuda, maka diharamkan mengawinkan kuda pada sapi, karena besarnya alat kelamin.

5. *Tuhfah al-Muhtaj*⁴⁷

⁴⁴ Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t. th.), Juz VIII, h. 95.

⁴⁵ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Futuh al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 68.

⁴⁶ Alawi al-Saqqaf, *Tarsiyh al-Mustafidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 365.

(تَنْبِيْهُ) مَرَّ أَنْ الْأَسْتِدْحَالَ كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ اخْتِرَامِهِ حَالَةَ الْإِنْزَالِ ثُمَّ حَالَةَ الْأَسْتِدْحَالِ بِأَنْ يَكُوْنَ لَهَا شُبْهَةٌ فِيْهِ

(Perlu diingat), telah dijelaskan, sungguh memasukkan air mani ke rahim hukumnya seperti persetubuhan, dengan syarat mani itu *muhtaram* (halal) saat dikeluarkan dan saat dimasukkan (ke rahim), yaitu saat memasuknya itu mempunyai keserupaan dengan persetubuhan.

6. Tafsir Jalalain⁴⁸

(فَمِنْ ابْتِغَى وَرَاءَ ذَلِكَ) مِنَ الرِّجَالِ وَالسَّرَايِ كَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فِي إِثْنَانِهِنَّ (فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) الْمُتَجَاوِزُونَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ

(Barang siapa mencari di balik itu) dari para istri dan budak wanita, seperti beronani dalam menggauli mereka, (maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.) [QS. al-Mukminun: 7] yang melewati batas pada perbuatan yang tidak halal bagi mereka.

7. Yas'alunaka 'an al-Din wa al-Hayat⁴⁹

إِنَّ عَوَاطِفَ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُوَّةِ لَا تَتَحَقَّقُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْلِ إِلَّا إِذَا كَانَ هَذَا النَّسْلُ قَدْ تَكُونُ وَخَرَجَ إِلَى الْحَيَاةِ بِالطَّرِيقِ الطَّبِيعِيِّ الْمَأْلُوفِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَفْتَحُونَ الْبَابَ لِمِثْلِ هَذَا الْأَسَالِيبِ الشَّاذَّةِ الْمُلتَوِيَّةِ الَّتِي سَتَأْدِي إِلَى هَذَا كَيَانِ الْأُسْرَةِ وَخَلْطِ الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِأَصُولِ الْفَضَائِلِ وَأَرْكَانِ الْعِقَّةِ وَالشَّرَفِ

Sungguh kasih sayang kebabakan dan keibuan tidak akan terwujud dalam hal yang terkait dengan keturunan, kecuali jika keturunan ini terwujud dan menjadi hidup dengan cara alami yang seperti biasanya. Mereka yang membuka pandangan pada semacam metode asing dan kabur ini, yang bisa mengakibatkan rutuhnya wujud sebuah keluarga, menyampur nasab, dan meremehkan prinsip-prinsip keutamaan, dan tiang kehormatan dan kemuliaan.

8. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an⁵⁰

⁴⁷ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abadi*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid VII, h. 303.

⁴⁸ Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* pada *al-Futuhat al-Ilahiyat*, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th), Jilid III, h. 184.

⁴⁹ Ahmad al-Syarbasyi, *Yas'alunaka 'an al-Din wa al-Hayat*, (Beirut: Dar al-Jail, t. th), Jilid II, h. 220.

⁵⁰ Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, t. th.), Juz V, h. 39.

وَأَمَّا الْخِصَاءُ فِي الْأَدْيِ فَمُصِيبَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا خُصِيَ بَطَلَ قَلْبُهُ وَقُوَّتُهُ عَكَسَ الْحَيَوَانِ وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَاجَوْا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Dan adapun pengebirian bagi manusia merupakan musibah. Sebab sungguh saat seseorang dikebiri, maka rusaklah hati dan kekuatannya, kebalikannya hewan. Dan terputus keturunannya yang diperintahkan dalam sabda Nabi Muhammad 'alaih al-Salam: "Saling nikahlah kalian maka kalian akan memiliki keturunan. Sebab sungguh aku beromba-lomba banyaknya pengikut dengan kalian pada umat-umat lain."

9. Al-Siraj al-Munir⁵¹

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَنَاجَوْا تَكَثَّرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Dari Sa'id bin Hilal al-Laitsi, sungguh Nabi Saw. bersabda: "Nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, sungguh aku bangga dengan sebab kalian pada umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Baihaqi)

418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa

Akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusuhan). Motif dan tujuannya beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau tindakan suatu lembaga/instansi, dan mencari keadilan.

S: a. Bolehkah mencari keadilan melalui demonstrasi? Sampai batas manakah demonstrasi dibenarkan Islam?

b. Bagaimana hukum orang/massa membuat kerusuhan? Bagaimana pula hukum tokoh/otak penggerak kerusuhan? Bagaimana hukum merusak fasilitas umum termasuk sarana ibadah?

J: Demonstrasi dan unjuk rasa yang bermuatan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mencari kebenaran dan demi tegaknya keadilan itu boleh selama:

1. Tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.
2. Sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musyawarah dan lobi.
3. Apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya boleh dilakukan dengan cara *ta'rif* (menyampaikan penjelasan) dan *al-wa'zhu* (pemberian nasihat).

Keterangan, dari kitab:

⁵¹ Ali al-Azizi, *al-Siraj al-Munir*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Jilid II, h. 173.

1. *Ihya 'Ulum al-Din*⁵²

قَدْ ذَكَّرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّ أَوَّلَهُ التَّعْرِيفُ وَثَانِيهِ الْوَعْظُ وَثَالِثُهُ التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ وَرَابِعُهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوبَةِ. وَالْجَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلَاطِينِ الرُّتَبَتَانِ الْأَوَّلَيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَادِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَكُونُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْذُورِ أَكْثَرَ. وَأَمَّا التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ، يَا مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَلِكَ إِنْ يُحْدِثُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى شَرُّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجْزُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ مَذْذُوبٌ إِلَيْهِ. وَلَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ التَّعَرُّضُ لِلْأَخْطَارِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ بِهَلَاكِ الْمَهْجَةِ وَالتَّعَرُّضُ لِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ لِعَلِمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ

Telah kami jelaskan, bahwa memerintah kebaikan itu mempunyai beberapa tingkatan. *Pertama* memberi pengertian, *kedua* memberi nasehat, *ketiga* berbicara kasar, *keempat* mencegah secara paksa agar mau melakukan kebaikan dengan memukul dan memberi hukuman. Adapun cara yang diperbolehkan dari cara-cara itu dalam menghadapi penguasa yaitu dua cara pertama. Sedangkan mencegah dengan kekerasan, maka tidak boleh dilakukan rakyat terhadap penguasa karena dapat menyulut fitnah, menimbulkan gelombang keburukan, dan lebih banyak bahaya yang timbul darinya. Adapun berbicara kasar, misalnya seperti ucapan: "Hai orang yang zalim. Hai orang yang tidak takut Allah Swt." dan semisalnya, jika perkataan itu bisa menimbulkan fitnah yang keburukannya bisa menimpa pihak lain, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika ia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka boleh dan bahkan sunnah.

Dan sungguh kebiasaan ulama salaf adalah berani menghadapi bahaya dan secara terang-terangan mengingkari perkara munkar tanpa peduli dengan bencana yang menimpa dirinya dan siap menantang berbagai macam siksaan. Sebab mereka tahu bahwa semuanya merupakan kesyahidan.

2. *Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*⁵³

وَالنَّسَائِيُّ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ

⁵² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h. 337.

⁵³ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Cet. ke-1, Juz II, h. 156.

فَغَيَّرَهُ لِسَانِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغَيِّرَهُ لِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ - أَيْ أَنْكَرَهُ - فَقَدْ بَرِيَ وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ

Dan al-Nasai meriwayatkan: "Barangsiapa melihat kemungkaran kemudian ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, maka ia telah terbebas (dari dosa kewajiban memberantas kemungkaran). Dan orang yang tidak mampu mengubahnya dengan tangannya, dan kemudian mengubahnya dengan lisannya, maka ia pun telah terbebaskan. Dan orang yang tidak mampu mengubahnya dengan lisannya, lalu ia mengubahnya dengan hatinya (tidak menyetujuinya) maka ia pun telah terbebaskan pula. Dan yang terakhir itu adalah iman yang paling lemah."

3. Al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir⁵⁴

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ (حم م ٤) عن أبي سعيد (صح)

"Barang siapa melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah. (HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Muslim, Ashhab Sunan al-Arba'ah), dari Abu Sa'id, (shahih).

419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang Tidak Memadai

Dewasa ini banyak terjadi pembebasan tanah milik rakyat, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun untuk bisnis semata, misalnya untuk kawasan perumahan. Biasanya ganti rugi yang ditawarkan tidak memadai, karenanya rakyat menolak. Namun biasanya juga dengan berbagai cara, akhirnya rakyat terpaksa menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak memadai, dan pindah entah kemana.

- S:
- a. Bagaimana hukum pembebasan tanah semacam itu?
 - b. Jika pemerintah ikut terlibat, siapakah pejabat pemerintah/orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah?
 - c. Bagaimana hukum keuntungan yang diperoleh dari usaha semacam itu? Dan bagaimana hukumnya jika keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membangun sarana ibadah?

⁵⁴ Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir*, Juz II, h. 327.

- d. Bagaimana hukum tinggal di kawasan perumahan yang dibangun di atas tanah dengan pembebasan seperti itu?
- J: a. Pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena termasuk *bai' al-mukrah* dan hukumnya haram serta tidak sah. Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut *syara'*, dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan.
- b. Yang bertanggungjawab adalah semua pejabat instansi pemerintah yang terkait.
- c. Keuntungan tersebut hukumnya haram. Bila dimanfaatkan untuk membangun sarana ibadah juga tetap haram.
- d. Hukumnya tafshil:
1. Apabila pihak yang menempati bangunan itu mengetahui bahwa prosedurnya haram, maka hukumnya haram juga.
 2. Jika tidak mengetahui prosedur tersebut, maka hukumnya boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Wahhab*⁵⁵

فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِعَدَمِ رِضَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Tidak sah akad seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa hak, karena tidak ada kerelaannya sesuai dengan firman Allah Swt.: "Kecuali harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujuan dari kalian." (QS. al-Nisa': 29).

2. *Rahmah al-Ummah*⁵⁶

وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ مِنْ بَالِغٍ مُخْتَارٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ

Para Imam sepakat atas sungguh jual beli itu sah dari orang baligh, berkehendak sendiri, dan bebas membelanjakan hartanya.

3. *Al-Asybah wa al-Nazhair*⁵⁷

⁵⁵ Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Pada al-Tajrid li Naf' al-'Abid*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Jilid II, h. 174.

⁵⁶ Abu Abdillah al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 158.

⁵⁷ Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1403 H), h. 67.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan penguasa atas rakyatnya itu terbatas dengan maslahat.

4. *Al-Asybah wa al-Nazhair*⁵⁸

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفِذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفِذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ

Ketika tindakan penguasa dalam hal yang terkait kepentingan umum itu harus didasarkan pada maslahat, maka secara syar'a perintahnya itu tidak berlaku kecuali sesuai dengannya. Dan jika bertentangan, maka tidak berlaku. Oleh karenanya, Imam Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharraj* dari bab *Ihya al-Mawat* menyatakan: "Dan seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan seseorang kecuali dengan hak yang sudah tetap serta ketahui."

5. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*⁵⁹

فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ   وَكَثُرَ النَّاسُ وَسَعَى الْمَسْجِدَ وَاشْتَرَى دَوْرًا هَدَمَهَا وَزَادَهَا فِيهِ وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ أَبْوَابًا أَنْ يَبْنَعُوا وَوَضَعَ لَهُمُ الْأَثْمَانَ حَتَّى أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيرًا دُونَ الْقَامَةِ وَكَانَتْ الْمَصَابِيحُ تُوضَعُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ   أَوَّلَ مَنْ يَتَّخِذُ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ   ابْتِاعَ مَنَازِلَ فَوَسَّعَ بِهَا الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ مَنَازِلَ أَقْوَامٍ وَوَضَعَ لَهُمُ أَثْمَانَهَا فَضَجُّوا مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ: إِنَّمَا جَرَأَكُمُ عَلَيَّ حِلْمِي عَنْكُمْ فَقَدْ فَعَلَ بِكُمْ عُمَرُ   هَذَا فَأَقْرَرْتُمْ وَرَضِيتُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ إِلَى الْحُبْسِ حَتَّى كَلَّمَهُ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ

Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan (bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama

⁵⁸ Ibn Najim al-Mishri, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Makkah: Nizar Musthafa al-Baz, 1997), Jilid I, h. 124.

⁵⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 162.

kali membuat dinding untuk mesjid.

Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumah-rumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumah-rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di kediamannya. Beliau lalu berkata: “*Sungguh kesabarankulah yang membuat kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap kalian, dan kalian menyetujuinya*”. Lalu beliau memerintah membenarkan mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan ia melepas mereka kembali.

6. *Tahqiq al-Asybah wa al-Nazhair li Tajuddin al-Subki*⁶⁰

وَلَعَلَّ مُرَادَهُ يَنْقُلُ الْأَتْفَاقَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى الدُّورَ مِنْ أَصْحَابِهَا فِي وَسْعِ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ
عُثْمَانُ وَكَانَ الصَّحَابَةُ فِي زَمَانِهِمَا مُتَوَافِرِينَ وَلَمْ يَنْقُلْ إِنْكَارُ ذَلِكَ

Dan barangkali maksud al-Rafi'i dengan kutipan kesepakatan para sahabat dan ulama setelahnya itu adalah sungguh Umar Ra. pernah membeli beberapa rumah dari pemiliknya untuk perluasan mesjid. Begitu pula Utsman Ra. Sementara para sahabat pada masa beliau berdua masih banyak dan tidak pernah dikutip riwayat yang mengingkari hal tersebut.

7. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*⁶¹

أَمَّا الْإِكْرَاهُ بِحَقِّ فَيَصِحُّ إِقَامَةُ لِرِضَا الشَّرْعِ مَقَامَ رِضَاهُ

Adapun pemaksaan dengan hak (kebenaran), maka akad jual belinya sah, sebab memposisikan persetujuan *syara'* pada posisi persetujuan pelaku akad.

8. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*⁶²

قَوْلُهُ جَبْرًا حَرَامًا) أَيْ وَأَمَّا لَوْ أُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ جَبْرًا حَلَالًا كَانَ الْبَيْعُ لَازِمًا كَجَبْرِهِ عَلَى
بَيْعِ الدَّارِ لِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ

(Ungkapan Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Dardiri: “Dengan paksaan yang haram.”), maksudnya bila pelaku akad dipaksa menjual dengan paksaan yang halal, maka akad jual belinya *lazim* –tetap-, seperti

⁶⁰ Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad 'Aud, *Tahqiq pada al-Asybah wa al-Nazha'ir li Tajuddin al-Subki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), Jilid I, h. 116.

⁶¹ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 3.

⁶² Ibn 'Irfah al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), Jilid III, h. 6.

memaksanya menjual rumah untuk perluasan mesjid, jalan umum, atau kuburan.

9. *Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq*⁶³

وَمِنْ مَعَاصِي الْبَطْنِ أَكْلُ الرِّبَا ... أَوْ مَا يَأْخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

Dan di antara maksiat perut adalah memakan riba ... atau harta yang diambil oleh aparat penguasa secara zalim ketika jual beli.

10. *Ihya' Ulum al-Din*⁶⁴

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَعَاصِي وَهِيَ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ مَوْضِعِهَا بِالنِّيَّةِ ... أَوْ يَبْنِي مَدْرَسَةً أَوْ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا بِمَالٍ حَرَامٍ قَصَدَ الْخَيْرَ فَهَذَا كُلُّهُ جَهْلٌ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي إِخْرَاجِهِ عَنْ كَوْنِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَمَعْصِيَةً

Bagian pertama adalah maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berubah dari posisinya (sebagai hal yang diharamkan) disebabkan niat (baik). ... atau seseorang membangun sekolahan, mesjid atau pondokan dengan uang haram dengan bermaksud melakukan kebajikan, maka semua itu adalah kebodohan, dan niat tidak akan berpengaruh mengeluarkan tindakan itu dari keberadaannya sebagai kezaliman, kejahatan dan maksiat.

11. *Fath al-Mu'in dan I'alah al-Thalibin*⁶⁵

لَوْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ بِطَرِيقٍ جَائِزٍ مَا ظَنَّ حِلَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْمَأْخُذَ مِنْهُ الْخَيْرَ لَمْ يُطَالَبْ فِي الْآخِرَةِ وَإِلَّا طُولِبَ

(وَقَوْلُهُ وَإِلَّا طُولِبَ) أَي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرَ وَالصَّلَاحَ بِأَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْفُجُورَ وَالْحَيَاةَ طُولِبَ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَلَا يُطَالَبُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِطَرِيقٍ جَائِزٍ

Seandainya seseorang mengambil sesuatu yang diduga halal dari orang lain dengan cara yang diperbolehkan, sementara pada hakikatnya sesuatu itu merupakan sesuatu yang haram, maka bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu baik, maka si pengambil tidak akan dituntut di akhirat, bila tidak maka ia akan dituntut.

(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Bila tidak maka ia akan

⁶³ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq* (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 65.

⁶⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid IV, h. 65.

⁶⁵ Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, *fath al-Mu'in dan I'alah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid III, h. 13.

dituntut.”), maksudnya bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu tidak baik dan saleh, yakni lahiriahnya lacur dan suka berkhianat, maka si pengambil akan dituntut di akhirat. Sedangkan di dunia, ia tidak akan dituntut sama sekali karena ia mengambil sesuatu tersebut dengan cara yang diperbolehkan.[]



Pengantar Rais 'Am PBNU
DR. KH. MA. Sahal Mahfudh

أَحْكَامُ أَلْفَقَهَاءِ
في مقررات مؤتمرات نهضة العلماء

SOLUSI

Problematika Aktual
Hukum Islam
Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes
Nahdlatul Ulama

(1926 - 2010 M)

